

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

#### 1.1.1 Potensi perikanan tangkap Kota Semarang

Kota Semarang sebagai salah satu kota pesisir di Indonesia, dengan garis pantai sepanjang  $\pm 36,63$  Km<sup>2</sup> dengan luas teritorial laut (4 mil) 100,48 Km<sup>2</sup>, memiliki potensi sumberdaya perikanan laut karena termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sektor 712 yang menjadi salah satu lokasi pengembangan pelabuhan perikanan di Indonesia dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan dan pemasaran produk perikanan, dan juga penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan yang ditetapkan dalam KEPMEN KP No. 45 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Potensi tersebut dibuktikan oleh peningkatan hasil produksi perikanan laut pada tahun 2011-2013 seperti yang tercatat pada Semarang dalam Angka (SDA), tahun 2014. Namun demikian, menurut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota Semarang, tentang Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, tahun 2013, permasalahan yang ada pada sektor perikanan tangkap Kota Semarang adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana berupa pelabuhan perikanan yang representatif. Saat ini, Kota Semarang hanya memiliki satu buah pelabuhan perikanan yang masih beroperasi berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (pelabuhan perikanan kelas D).

KEPMEN KP No. 45 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional juga menjelaskan keberadaan pelabuhan perikanan sangat diperlukan guna menunjang aktifitas perikanan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, mulai dari aktifitas praproduksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumber daya ikan, serta wadah aktifitas kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan aktifitas penunjang perikanan. Keberhasilan dalam pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), serta optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap. Hal tersebut dapat dilihat secara nyata bahwa pembangunan pelabuhan perikanan dapat menimbulkan dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi sektor ekonomi lainnya yang selanjutnya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan memajukan ekonomi di wilayah tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Direktorat Prasarana Perikanan Tangkap, tahun 2004.

### 1.1.2 Fasilitas pelabuhan perikanan Tambaklorok memprihatinkan

Tambaklorok merupakan salah satu kawasan pesisir-pantai, yang masuk dalam wilayah kelurahan Tanjung Emas, kecamatan Semarang Utara. Berdasarkan penuturan sejarah oleh sesepuh setempat, yang diulas oleh Pambudi dalam blognya, *Ngisor Asem: Tambaklorok Menjadi Kampung Bahari*, tahun 2015, Tambaklorok memiliki identitas sebagai kampung nelayan sejak tahun 1950, dan menjadi basis aktifitas perikanan tangkap terbesar di Kota Semarang sejak tahun 1975. Pada tahun 1975, Tambaklorok mulai ramai disinggahi nelayan-nelayan dari luar Kota Semarang, baik yang menetap atau sekedar untuk menjual hasil tangkapannya. Guna mewedahi aktifitas perikanan tangkap tersebut, Tambaklorok memiliki dua buah sarana-prasarana pelabuhan perikanan kelas D, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambaklorok lama dan baru. Namun demikian, kedua PPI tersebut dianggap kurang representatif dan tidak berfungsi secara optimal.

Kondisi PPI Tambaklorok lama dikatakan kurang representatif karena fasilitas-fasilitas yang terdapat kurang memadai, hanya terdapat satu buah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tidak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya, seperti balai penyuluhan, waserda/kios nelayan, telepon, tempat boro nelayan, tempat ibadah, gedung pengepakan, instalasi air, instalasi BBM/solar, *slipway*, *sound system*, MCK yang rusak, pagar keliling, dan tempat penyimpanan keranjang, seperti yang dimuat dalam *Suara Merdeka*, 21 Januari 2003.

Pada tahun 2004, pemerintah Kota Semarang membangun PPI Tambaklorok baru dengan dalih pengembangan PPI Tambaklorok lama yang kondisinya kurang memadai. Pemerintah merencanakan PPI Tambaklorok baru yang mampu mewedahi hasil tangkapan hingga 50 ton/hari, dengan fasilitas utama, seperti TPI, *breakwater*, tanggul pengaman, SPBN, WC umum/MCK, fasilitas penunjang berupa 84 kios, terdiri dari 10 warung makan, 14 kios ikan panggang, 5 kios ikan rebus, 15 kios ikan asin, 20 kios ikan segar, dan 20 kios warung sembako, serta PPI tersebut akan dikembangkan sebagai wisata bahari yang memiliki fasilitas restoran dan lesehan dengan menu makanan khas ikan laut selain dari fasilitas TPI dan pasar ikan, dan permasalahan tersebut baru diberitakan dalam *Suara Merdeka*, 1 Februari 2007.

Pada tanggal 1 Maret 2007, kembali diberitakan oleh *Suara Merdeka*, bahwa pengembangan tersebut tidak terlaksana sesuai rencana, pemerintah hanya membangun TPI,

SPBN, WC umum/MCK, *breakwater*, tanggul dan dermaga. Parahnya, pembangunan tersebut tidak memperbaiki kondisi sebelumnya. Fasilitas-fasilitas PPI Tambaklorok baru berangsur-angsur juga mengalami kerusakan, khususnya fasilitas TPI yang menjadi wadah aktifitas utama para pelaku aktifitas. Kerusakan-kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh pemerintah tidak memperhatikan kondisi lingkungan Tambaklorok yang cenderung kurang baik. Belum lagi permasalahan status tanah yang hanya berupa pinjaman dari PT. PELINDO III yang menuai banyak protes.

Kondisi tersebut mengakibatkan aktifitas yang terjadi pada PPI Tambaklorok baru hanya berlangsung selama tiga bulan saja karena para pelaku aktifitas merasa kurang nyaman untuk beraktifitas di PPI tersebut, khususnya aktifitas pada fasilitas TPI. Pada akhirnya, para pelaku aktifitas terpaksa kembali menggunakan TPI yang terdapat di PPI Tambaklorok lama dengan kondisi rusak dan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh PERMEN KP No. PER. 08/MEN/2012, tentang Kepelabuhan Perikanan, tahun 2012, seperti yang diberitakan oleh *Suara Merdeka*, 23 November 2009.

Berdasarkan PERMEN KP No. PER. 08/MEN/2012, tentang Kepelabuhan Perikanan, tahun 2012, dan Perda Kota Semarang No. 9 tahun 2010, tentang Tempat Pelelangan Ikan, keberadaan pelabuhan perikanan sangat penting, terutama keberadaan fasilitas TPI, karena TPI digunakan untuk memfasilitasi nelayan dalam aktifitas penjualan dan distribusi hasil tangkapan mereka yang dilakukan dengan sistem lelang dengan harga dasar yang ditentukan oleh pengelola/pemerintah sehingga dapat melindungi nelayan dari permainan harga para tengkulak yang pada umumnya merugikan nelayan. Disamping itu, keberadaan TPI difungsikan untuk menjaga mutu/kualitas hasil tangkapan saat didaratkan dan dibongkar agar tetap dalam keadaan baik dan higienis. Kondisi-kondisi tersebut melatarbelakangi perlunya perbaikan dan pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan, terutama fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi wadah utama aktifitas pemasaran dan distribusi hasil tangkapan para nelayan.

Dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah Kota Semarang bahwa kecamatan Semarang Utara menjadi kawasan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang, tahun 2011 – 2030 dan PERMEN Perhubungan No. PM 18 Tahun 2013, tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, disebutkan bahwa kawasan Tambaklorok menjadi kawasan permukiman dan pelabuhan rakyat sehingga pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang mengutamakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tetap dapat

dilakukan di Tambaklorok, yaitu dengan memanfaatkan lokasi yang ditentukan sebagai pengembangan pelabuhan rakyat dalam peraturan tersebut. Kondisi tersebut juga didukung dengan dibebaskan status pinjaman atas lahan Tambaklorok oleh PT. PELINDO III, seperti yang dimuat dalam *Suara Merdeka*, sehingga saat ini lahan tersebut dapat dikelola sepenuhnya oleh pemerintah dan warga Tambaklorok. Namun demikian, posisi spesifik tapak dan zonasi fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambaklorok di dalam PERMEN Perhubungan No. PM 18 Tahun 2013, tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang belum ditentukan, sehingga posisi tapak spesifik fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai salah satu fasilitas di dalam PPP juga belum diketahui. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui posisi tapak spesifik dan zonasi PPP Tambaklorok Semarang terlebih dahulu untuk dapat menentukan posisi tapak spesifik TPI Tambaklorok tersebut.

Salah satu anggota komisi C DPRD Kota Semarang juga berkata bahwa perancangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tersebut harus layak dipakai oleh nelayan serta disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi lingkungan di sekitarnya agar permasalahan sebelumnya tidak terulang kembali.

### **1.1.3 Prediksi hilangnya kawasan pesisir-pantai Kota Semarang**

Pakar hidrolika Universitas Diponegoro Semarang, DR. Robert J. Kodoatie Sudah sejak dulu Kota Semarang kerap dilanda banjir dan rob, dan menjadi permasalahan klasik, terutama di daerah pesisir-pantai (BBC Indonesia, 2007). Melihat kondisi geografi dan metode penanganannya, Kota Semarang dinilai tidak bisa terbebas dari banjir. Hal tersebut didasari oleh fenomena saat terjadi hujan dengan intensitas sedang, banyak titik-titik genangan, apalagi jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang cukup lama (*Suara Merdeka*, 18 Juni 2013).

Banjir dan rob merupakan bencana yang berbeda faktor penyebabnya. Jika berbicara mengenai banjir, DR. Robert J. Kodoatie mengatakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya banjir adalah kesalahan tata guna lahan, banyaknya ruang terbuka hijau yang semestinya menjadi daerah resapan justru berubah menjadi bangunan-bangunan baru, padahal itu dapat mengakibatkan penyerapan air ke dalam tanah terhambat dengan ukuran 5 – 20 kali lipat lebih lambat.

Persoalan selanjutnya adalah penanganan sampah dan penurunan muka tanah. Menurut beliau, yang seharusnya dilakukan adalah pengelolaan dan pemisahan antara air hujan, limbah, dan air bersih, atau disebut dengan *waterfall city*. Dengan konsep tersebut,

pengelolaan lebih memungkinkan, alasannya penanganan melalui metode grafitasi sudah tidak mungkin dilakukan, terutama di wilayah yang memiliki ketinggian lebih rendah dari permukaan air laut.

Banjir dan rob memiliki keterkaitan satu sama lain, hanya saja menurut Robert, rob disebabkan oleh lima faktor, yaitu faktor yang terjadi secara alami, seperti konsolidasi tanah aluvial (penurunan tanah yang belum mampat), naiknya permukaan air laut karena pemanasan global, dan pergerakan lempeng Australia yang menurunkan permukaan daratan di Pantai Utara Jawa, serta dua faktor lagi ditimbulkan oleh ulah manusia sendiri, seperti pengambilan air tanah secara berlebihan (eksploitasi) dan pembangunan tanpa memperdulikan faktor kondisi lingkungan.

Dalam ulasan lainnya, DR. Robert J. Kodoatie berkomentar bahwa Pemerintah Kota Semarang hanya menjadikan fenomena penurunan tanah sebagai pengetahuan saja dan tidak pernah merealisasikan program nyata untuk mengantisipasinya. Laju penurunan muka tanah tertinggi berada di kawasan kampung Tambaklorok dengan laju penurunan 11 cm/tahun, seperti yang diberitakan dalam *Kompas*, 22 November 2015.

Berdasarkan fakta tersebut, pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambaklorok perlu memperhatikan dan tanggap terhadap kondisi lingkungan guna meminimalisasi dampak dari permasalahan lingkungan yang terjadi dengan tidak mengesampingkan tanggap iklim lingkungan tapak yang berada di tepi pantai yang memiliki kondisi angin cenderung kencang, kelembaban tinggi, suhu tinggi (panas) pada siang hari, serta suhu rendah (dingin) pada malam hari, didasarkan pada teori arsitektur ekologi (Frick dan Suskiyatno, 1998).

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, teridentifikasi beberapa masalah yang muncul pada objek studi, antara lain:

1. Rusaknya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang ada, serta kurang memadai dan kurang memenuhi standar minimal pelabuhan perikanan, terutama fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sehingga perlu dibuat rancangan TPI yang relatif lebih baik, sesuai dengan standar dan lingkup layanannya.
2. Belum ditetapkannya posisi tapak spesifik dan zonasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sehingga posisi tapak spesifik fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga belum ditetapkan. Perlu diketahui terlebih dahulu posisi tapak spesifik dan zonasi PPP

Tambaklorok untuk mengetahui posisi tapak spesifik dalam perancangan bangunan fasilitas TPI.

3. Kerusakan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, termasuk fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), salah satunya disebabkan oleh kurang tanggapnya rancangan bangunan terhadap lingkungan tapak, seperti tingginya laju penurunan muka tanah di Tambaklorok, yaitu mencapai 11 cm/tahun seperti karakteristik tanah aluvial serta diperparah oleh aktifitas manusia yang mempercepat proses tersebut, seperti eksploitasi pengambilan air tanah dan pembangunan yang kurang tanggap lingkungan sehingga menyebabkan kawasan tersebut rentan terhadap banjir dan rob hingga diprediksi tenggelam pada tahun 2030.
4. Karakteristik kawasan pesisir-pantai dengan kondisi angin cenderung kencang, kelembaban tinggi, suhu tinggi (panas) pada siang hari, serta suhu rendah (dingin) pada malam hari berpotensi mengganggu kestabilan bangunan dan kestabilan aktifitas perikanan tangkap di pelabuhan perikanan, termasuk fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka munculah rumusan masalah yang harus dipecahkan, antara lain:

Bagaimana rancangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang sesuai dengan standar dan lingkup layanannya, serta tanggap terhadap lingkungan?

### **1.4 Batasan Masalah**

Adapun permasalahan yang dibahas dalam studi dibatasi oleh beberapa hal berikut:

1. Lokasi studi/perancangan berada di kawasan pengembangan pelabuhan rakyat Tambaklorok sesuai dengan PERMEN Perhubungan No. PM 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
2. Rancangan mengacu pada kapasitas pelabuhan perikanan kelas III berupa Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sesuai dengan PERMEN KP No. 08 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
3. Rancangan sebatas penentuan fungsi, olah bentuk bangunan, dan olah tapak fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tanggap terhadap kondisi lingkungan, sesuai dengan teori aspek perancangan, sedangkan perhitungan investasi tidak akan dilakukan

4. Tanggap lingkungan yang dimaksud hanya sebatas cara/metode untuk menanggapi kondisi kawasan pantai Tambaklorok yang mengalami laju penurunan tanah relatif tinggi dan rentan terhadap banjir, rob, serta kondisi iklim dan cuaca tapak, seperti kondisi angin, hujan, kelembaban, dan panas matahari, sesuai dengan teori arsitektur tanggap lingkungan/arsitektur ekologi, sedangkan perhitungan pembebanan struktur, angin, luminasi (cahaya), dan termal tidak akan dilakukan.

### 1.5 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada skripsi ini adalah menciptakan sebuah rancangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambaklorok Semarang sebagai wadah bagi aktifitas perikanan tangkap yang sesuai dengan standar dan lingkup layanannya, serta tanggap lingkungan.

### 1.6 Manfaat

Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari skripsi ini bagi masing-masing golongan dan kelompok:

1. Bagi keilmuan arsitektur

Dapat menambah wawasan bagi mahasiswa, akademisi maupun peneliti dalam bidang arsitektur, selain itu juga dapat digunakan sebagai komparasi untuk rancangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang tanggap lingkungan.

2. Bagi praktisi di bidang arsitektur

Sebagai salah satu komparasi rancangan, terutama terkait dengan rancangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang tanggap lingkungan.

3. Bagi masyarakat

Membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat Tambaklorok tentang pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang tanggap lingkungan.

4. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Dapat digunakan sebagai rekomendasi mengenai rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambaklorok yang tanggap lingkungan.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi tentang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambaklorok Semarang (Rancangan Tanggap Lingkungan) dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah mengenai potensi perikanan tangkap Kota Semarang, kondisi PPI Tambaklorok baru sebagai sarana aktifitas perikanan tangkap, rencana pengembangan pelabuhan Tanjung Emas, serta gagasan perancangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambaklorok yang tanggap lingkungan. Bab ini juga berisikan identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan.

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi informasi mengenai teori dan pedoman yang dipakai sebagai data sekunder dalam skripsi ini. Teori dan pedoman yang dipakai berkaitan dengan teori dan standar pelabuhan perikanan, teori dan standar Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Teori arsitektur tanggap lingkungan, dan teori pengelolaan/pengolahan kawasan rentan banjir, serta tinjauan terhadap objek komparasi mengenai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan komparasi pengelolaan kawasan rentan banjir.

### 3. BAB III METODE KAJIAN-PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang tahap dan metode kajian-rancang yang terdiri dari dua tahap yaitu tahap pemrograman yang menggunakan metode programatik dan tahap perancangan yang menggunakan metode pragmatis dan kedua tahap tersebut menggunakan pendekatan rancangan tanggap lingkungan.

### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum lokasi perancangan, tahap analisis terkait analisis aspek fungsi, bangunan, dan tapak, penetapan konsep berdasarkan hasil analisis, proses transformasi konsep ke dalam rancangan, dan pembahasan hasil rancangan.

### 5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai rancangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambaklorok Semarang (Rancangan Tanggap Lingkungan).





Gambar 1.1 Diagram kerangka pemikiran